

**TERITORIALISASI PASCA ERUPSI MERAPI DAN KEARIFAN LOKAL**

**“HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN MERAPI”**

Sri Murtopo

LSM

Kawan\_topo@yahoo.com

Leslie Retno Angeningsih

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Yogyakarta

leslie\_angeningsih@yahoo.com

**ABSTRACT**

*This study aims to identify the interconnection among actors in the dynamic of Disaster Prone Area arrangement conflicts, and to know how villagers articulate the local wisdom of living side by side with Merapi disasters. This research was conducted in Balerante Village, Kemalang District, Klaten Regency using a case study with qualitative approach. Observation, in-depth interview, and documentation used to examine programs, events and activities on relocation in the Disaster Prone Areas. Seventeen informants were selected using purposive sampling. Political ecology approach and triangulation techniques were used in analyzing data. The results showed that Balerante villagers rejected the government's policy on relocation as results from: the villagers believed that they themselves owned the mechanism to face with Merapi eruption; there were inconsistencies among Regional Government agencies about the Central Government's rules on KSN and KRB maps. Balerante villagers then were back to their belief by performing "kenduri" or "larungan" rituals as a tribute to the Merapi guards. Their observation on Merapi eruption characteristics had become a local wisdom knowledge on the anticipation of Merapi disaster. "Living in harmony with Disaster" was government's strategy to intervene the infrastructure development and community capacity building at the Disaster Prone areas III.*

**Keywords :** *Territorial, Disaster Prone Areas, relocation, local wisdom*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antar aktor dalam dinamika konflik pengaturan Kawasan Lindung, dan untuk mengetahui bagaimana masyarakat mengartikulasikan kearifan lokal kehidupan yang berdampingan dengan bencana Merapi. Penelitian ini dilakukan di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten dengan menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan untuk mengetahui program, kejadian dan kegiatan relokasi di

Daerah Rawan Bencana. Tujuh belas informan dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Pendekatan ekologi politik dan teknik triangulasi digunakan dalam menganalisa dan mengkonfirmasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Desa Balerante menolak kebijakan relokasi karena alasan: penduduk desa percaya bahwa mereka memiliki mekanisme sendiri untuk menghadapi erupsi Merapi; Ada ketidakkonsistenan antar instansi Pemerintah Daerah tentang peraturan dari Pemerintah Pusat tentang peta KSN dan KRB. Selanjutnya, warga Desa Balerante kembali ke keyakinan mereka dengan melakukan ritual "kenduri" atau "larungan" sebagai penghormatan kepada para penjaga Merapi. Pengamatan mereka terhadap karakteristik erupsi Merapi telah menjadi kearifan lokal tentang antisipasi bencana Merapi. "Hidup selaras dengan Bencana" adalah strategi pemerintah untuk mengintervensi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat di daerah Rawan Bencana III.

**Kata-kata kunci** : teritorial, Kawasan Rawan Bencana, relokasi, kearifan lokal

## 1. PENDAHULUAN

Bencana erupsi Gunung Merapi pada tanggal 27 November 2010 telah menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Berdasarkan data Pusdalops BNPB terdapat 242 orang meninggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 97 orang di wilayah Jawa Tengah. Tercatat ada 3.424 rumah di DIY dan 3.705 rumah di wilayah Jawa Tengah mengalami kerusakan akibat erupsi Merapi (BNPB & Bappenas, 2011: 1). Mempertimbangkan banyaknya korban jiwa dan harta benda yang ditimbulkan akibat erupsi Merapi, Pemerintah Pusat akhirnya menetapkan bencana Merapi sebagai bencana alam nasional. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi dengan menyusun Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi untuk Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010.

Peta KRB digunakan sebagai dasar relokasi penduduk yang

bertempat tinggal di Area Terdampak Langsung (ATL) I atau KRB III, menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2011 – 2013.

Sebagian wilayah Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, yang dihuni oleh 167 Kepala Keluarga (KK) masuk dalam KRB III, sehingga menjadi target relokasi. Rencana Pemerintah memindahkan masyarakat ke tempat yang lebih “aman”, ternyata menuai penolakan. Kebijakan teritorialisasi menimbulkan perspektif berbeda jika pemerintah berpikir untuk keamanan dan keselamatan masyarakat, sebaliknya masyarakat merasa memiliki “kearifan lokal”, yakni keyakinan bahwa mereka bisa hidup berdampingan dengan Merapi. Teritorialisasi adalah suatu proses yang dilalui oleh semua negara modern dalam membagi wilayahnya dalam zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan tumpang tindih, mengatur kembali penduduk dan sumberdaya di dalam unit-unit ini,

dan membuat aturan yang membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah ini dapat dimanfaatkan (Vandergeest & Peluso, 1995: 387 dalam Li, 2007: 21).

Strategi untuk meningkatkan kontrol dapat melalui swastanisasi sumberdaya (dalam kerangka yang ditetapkan oleh negara) atau pengelolaan langsung oleh badan-badan pemerintahan; mengalakkan pemukiman di daerah yang tidak berpenduduk; atau melarang penghunian; sentralisasi kewenangan pemerintah; atau penyerahan kewenangan kepada yang lebih rendah. Penetapan peta, pelaksanaan sensus, penetapan batas-batas dan daftar desa, penggolongan dan pematokan hutan, semua itu dapat dilihat sebagai mekanisme untuk menetapkan mengatur dan menegaskan control terhadap hubungan antara masyarakat dan sumber daya (Li, 2007: 22).

Kajian tentang bencana erupsi Merapi dan kehidupan masyarakat sekitarnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti Indonesia maupun Asing, tetapi kajian dari pendekatan ekologi politik belum banyak dilakukan. Salah satu penelitian adalah tesis karya

Kuswijayanti (2007) tentang Konservasi Sumberdaya Alam Gunung Merapi: Analisis Ekologi politik, berfokus pada pro-kontra terkait Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) pada tahun 2004. Istilah ekologi politik secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu ekologi dan politik. Ekologi berarti sumberdaya alam, dan politik adalah “kekuasaan” (Tarmuji, 2012: 174). Ekologi politik menurut Blaike & Brookfield (1987 dalam Satria (2009: 22) adalah “*political ecology is the concerns of ecology and broadly defined political economy*” (analisis yang memperhatikan ekologi dan apa yang secara luas didefinisikan sebagai ekonomi politik).

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan dan keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Seluruh kearifan tradisional dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku keseharian manusia, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam gaib. Jadi kearifan tradisional bukan hanya

menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang adat dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni dan komunitas ekologis ini harus dibangun (Woro Caritas, 2013: 86).

Proses tarik-ulur antara masyarakat dan pemerintah pusat berjalan cukup lama dan pada akhirnya kebijakan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Penataan teritorialisasi kawasan konservasi berdasarkan kebijakan “*zero growth*” atas dasar karakteristik alamiah erupsi Merapi. Peta KRB yang dikeluarkan BVMPG tahun 2010, dikuatkan dengan Kebijakan Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascaerupsi Merapi tahun 2011, dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, masih relevan untuk dikaji dari aspek ekologi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relasi antar aktor dalam dinamika konflik penataan ruang Kawasan

Rawan Bencana III, dan untuk mengetahui artikulasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan konsep hidup harmoni berdampingan dengan Merapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perspektif ekologi politik dalam studi kebencanaan terutama mengenai penataan pemukiman dan akses sumberdaya alam dalam proses kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pengelolaan sumberdaya alam.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif studi kasus di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang sebagian wilayahnya masuk dalam Kawasan Rawan Bencana III. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, Desa Balerante masuk wilayah terdampak kebijakan relokasi. Informan ditentukan dengan teknik *purposive* dengan jumlah keseluruhan 17 orang dari unsur Bappeda, BPBD, Konsultan Bank Dunia, Konsultan Rekompak, Pegiat PRB dan masyarakat Desa. Analisis

data menggunakan pendekatan ekologi politik, yaitu sebuah pendekatan untuk mengetahui apakah resiko suatu bencana terdistribusikan secara merata atau tidak, dan apakah bencana mempertajam ketimpangan sosial-ekonomi atau tidak. Asumsi dasar ekologi politik adalah setiap pelaku memiliki sistem nilai sendiri menghadapi bencana, dan cara pemecahan masalah bencana. Upaya lanjutan yang bisa dibangun adalah bahwa orang kecil, miskin dan termarginalkan dapat mengemukakan pendapat mereka, yang tidak bisa dengan mudah ditepiskan karena terhambat oleh kelembagaan sosial, dan asimetrik kekuasaan dalam pengambilan keputusan (Lassa, 2006: 2). Ekologi politik digunakan untuk meneliti sumber-sumber keputusan dalam relokasi pasca erupsi Merapi dan memahami bagaimana interaksi manusia dengan lingkungannya.

Desa Balerante adalah satu desa bagian dari Kecamatan Kemalang. Kecamatan Kemalang terletak di bagian paling Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat Kecamatan Kemalang dipengaruhi oleh budaya Mataram Yogyakarta

dan Surakarta. Kedua budaya tersebut secara keseluruhan hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan terkait dengan otoritas kultural. Masyarakat Cangkringan memiliki otoritas budaya yaitu Mbah Maridjan sebagai juru kunci Gunung Merapi dan diteruskan kepada Asih, anaknya. Sedang, masyarakat Kemalang hanya bergantung pada keyakinan personal penduduknya.

Desa Balerante terletak di lereng Gunung Merapi, kondisi tanah perbukitan, dengan kelerengan mencapai 30%, pada ketinggian 1200 meter dari permukaan air laut. Jumlah penduduk Desa Balerante tahun 2014 adalah 1919 jiwa, sedang pada tahun 2010 berjumlah 1676 jiwa. Selama 5 tahun pasca erupsi pertambahan penduduk sebanyak 243 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 599 KK terdiri atas 951 laki-laki dan 958 perempuan. Kepadatan penduduk Desa Balerante adalah 499/km<sup>2</sup>. Luas wilayah 351.1230 ha berupa tanah desa seluas 38 ha dan tanah penduduk seluas 313,1230 ha.

### **3. HASIL**

#### **3.1. Erupsi Merapi dan Penataan Kawasan Rawan Bencana**

Erupsi Merapi tahun 2010, menjadi momentum bagi negara untuk menata ulang kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) seluas 6.410 ha, yang telah ditetapkan melalui SK Menhut 134/Menhut-II/2004 pada tanggal 4 Mei 2004. Penataan kawasan Merapi diawali dengan membuat peta radius aman dalam situasi bencana. Pemetaan adalah sebuah alat untuk menetapkan otoritas wilayah atas bentang alam. Peta ini digunakan untuk mengkonsolidasikan dan menggunakan kekuasaan atas orang, tanah dan sumberdaya (D'andrea, 2013:190).

Permasalahan berkaitan dengan peta KRB adalah bagaimana pendekatan digunakan untuk mengasumsikan ruang sebagai konsepsi abstrak dan hampa. Peta tersebut tidak berhubungan dengan realitas di lapangan dan sejarah kehidupan masyarakat sekitar lereng Merapi. Garis dalam peta KRB menunjukkan Kadus I, Desa Balerante dari Kampung Sambungrejo, Ngipiksari, Ngleo, Sukorejo, Karangrejo hingga Gondang terdapat 135 rumah masuk wilayah *zero growth*. Hasil dari rekomendasi BPPTK yang disambut

baik oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, PU, Kehutanan, Bappenas, BNPB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan penandatanganan kesepakatan Kawasan Rawan Bencana Merapi masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gunung Merapi.

Untuk mewujudkan KRB III bebas hunian, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Dunia membentuk lembaga *Java Reconstruction Fund* (JRF). Bersama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU yang memiliki program Rehabilitasi dan Rekontruksi Masyarakat dan Pemukiman berbasis Masyarakat (REKOMPAK) tahun 2006 untuk pasca gempa bumi Jogja-Jawa Tengah, berusaha mengalihkan sisa dana untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca erupsi. Merapi yang berada di KRB III/ATL I. JRF memiliki sisa dana sebesar US \$ 3,5 juta untuk melakukan relokasi mandiri. Bank Dunia juga mengumpulkan dana hibah dari beberapa negara donor, seperti Australia, Denmark, Belanda, Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa. Dana yang diperoleh

sebesar USD 11,5 juta, selanjutnya dikelola "PNPM *Support Facility*" bagi masyarakat terdampak langsung erupsi Merapi (BNPB & Bappenas, 2011: 79). Bersamaan dengan Pemerintah melakukan pembangunan untuk pengurangan risiko bencana, sejak November 2010, sosialisasi KRB tentang relokasi dilakukan kepada warga Desa Balerante yang masih tinggal di pengungsian.

Pernyataan Kepala Dusun I Jainu pada koran *Republika* 10 November 2010 ketika di posko pengungsian Gedung Olah Raga (GOR) SMA 3 Klaten, bahwa wilayahnya sudah tidak layak lagi dihuni dan relokasi menjadi kebutuhan mendesak. Pendapat Kadus I tidak mewakili pendapat warga desa secara umum. Sebagian warga ada yang menerima untuk direlokasi dan sebagian lainnya menolak. Penolakan tidak ditunjukkan saat sosialisasi, melainkan dari sikap nekad warga, yaitu ketika pagi hari masyarakat memasuki zona KRB III, yang ketika itu dijaga ketat oleh aparat TNI dan Polri. Sore harinya mereka kembali ke pengungsian.

Ketika ada penurunan tingkat bahaya, secara bergelombang

setiap hari warga pulang-pergi dari tempat pengungsian ke rumah asal mereka, seperti diungkapkan oleh Bapak Kamto, sebagai berikut :

*“Selama pengungsian saya fasilitasi warga, untuk naik-turun ke tempat pengungsian, dengan 10 unit truk. Pagi jemput pengungsian dan saya drop ke RT masing-masing untuk bersih-bersih rumah. Di Balerante sapi yang mati 570 ekor dan itu relawan dan warga yang kubur dan selesai selama 23 hari.”*

Setelah normal kembali pemukiman warga Balerante, satu persatu warga menolak untuk di relokasi. Dari 167 KK yang tinggal di KRB III/ATL I, hanya tinggal 32 KK yang bersedia direlokasi dengan syarat lokasi baru harus dekat dengan pemukiman lama. Proses relokasi warga yang bersediapun juga cukup alot. Rencana awal pemukiman akan dibangun di tanah kas Desa, tetapi menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah tanah kas Desa dilarang untuk pemukiman. Sedang rencana relokasi di Dukuh Bendorejo yang berasal dari usulan warga, mendapat persetujuan dari BPBD, tetapi tidak mendapat rekomendasi dari Bappeda, karena wilayah masih masuk KRB III.



Peta KRB yang menjadi patokan dari BPBD adalah peta awal dari BPPTK yang merekomendasikan 167 KK Desa Balerante untuk di relokasi, sedangkan peta yang menjadi acuan Bappeda adalah Peta KSN yang ditandatangani oleh 5 Menteri dan 2 Gubernur. Dalam peta KSN ada perluasan KRB III, yang menurut mantan Kabid RR BPBD Klaten Wachyu Adi Pramono, sekitar 400 KK harus di relokasi. Namun sesuai peta KSN tidak ada pembiayaan untuk sebesar itu.

### **3.2. Relokasi dan Kepentingan Antar Aktor**

Program relokasi yang dilakukan Rekompak adalah replikasi program relokasi korban longsor di Kabupaten Bantul. Program ini memberikan dana stimulan Rp 30 juta, dan masyarakat memiliki keleluasaan menentukan tipe rumah, minimal luas bangunan 36 m<sup>2</sup> serta konstruksi rumah harus memenuhi persyaratan teknis dan metode rumah tahan gempa. Warga bisa menggunakan tanah milik sendiri, atau mencari tanah sendiri, atau menggunakan tanah kas Desa. Untuk tanah akan mendapat penggantian sebesar Rp 7 juta, dengan asumsi mendapatkan tanah seluas 100m<sup>2</sup>,

ditambah fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) 50 m<sup>2</sup> per rumah, sehingga total ada 150 m<sup>2</sup>/KK.

Program relokasi Desa Balerante di lapangan mengalami kegagalan pada tahap sosialisasi. Hal ini disebabkan, sosialisasi awal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melarang warga tinggal di KRB III, dan tanah di KRB III akan diberi ganti rugi oleh Pemerintah karena akan dijadikan hutan lindung, seperti diungkapkan Bapak Sudiro warga Sambungrejo berikut ini :

*“Dalam situasi yang masih tegang kami dikumpulkan di aula shelter, diinformasikan akan di relokasi rumah-rumah kami dan disini akan dibuat hutan lindung. Warga sini tidak setuju kalau akan dibuat hutan lindung, karena pada tegang semua maka bicaranya juga macam-macam, ya gagalnya itu tidak boleh untuk dibuat hutan lindung. Setelah itu ada informasi lagi bahwa tidak akan dibuat hutan lindung hanya akan dibuat rumah di bawah, tegalnya di sini, kalau mau menggarap silahkan tapi nanti kalau sore harus turun lagi ke bawah, kalau sudah direlokasi disini tidak boleh di “sobo”.”*

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Wachju Adi Pratama, pelaksana rehab-rekon, yang merasa pernyataan para pihak terkait pelaksanaan relokasi sangat mempengaruhi psikologis warga. Akibatnya, warga menjadi antipati dengan kata “relokasi”, seperti yang diungkapkan Beliau berikut ini :

*“Penolakan warga berawal dari statement Pemerintah Provinsi yang menyatakan bahwa warga akan direlokasi dan lahan mereka diganti, yang mendapat penolakan kuat dari masyarakat. Ini belum sosialisasi karena statement-statement yang ada belum ada dasarnya sebelum penetapan Renaksi RR.”*

Jika meminjam istilah Tania Li (2002: 21-22), program relokasi warga Desa Balerante merupakan teritorialisasi yang belum sempurna yang biasanya ditentang oleh masyarakat. Keterlibatan banyak departemen pemerintah, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda atau bertentangan terjadi dalam proses pascabencana erupsi Merapi. Jika dilihat dari lembaga Internasional, *World Bank* dengan utangnya, program PNPM perdesaan, ternyata yang mengawali pembangunan akses jalan di KRB III,

sedangkan melalui PNPM perkotaan memberikan program *cash for work* untuk membersihkan rumahnya yang rusak. Sedangkan melalui *grand* Rekompak-JRF akan melakukan relokasi terhadap rumah yang diperbaiki dengan program PNPM.

Kebijakan yang anomali ketika melarang membangun pemukiman ternyata banyak program mendorong kegiatan berekonomi di kawasan terlarang, penggantian bantuan ternakpun juga diberikan di kawasan yang terlarang untuk pemukiman. Dalam masyarakat sipil dan kelompok peduli, tanpa koordinasi dengan Pemerintah Daerah juga melaksanakan kegiatan rehab-rekon di wilayah Desa Balerante. Mulai dari proses pembersihan puing-puing hingga bantuan pemulihan ekonomi semua dilaksanakan di kawasan yang dilarang untuk pemukiman. Program yang dilakukan ternyata tidak saling mendukung dan saling bertentangan inilah penyebab kegagalan proses relokasi.

Pilihan menjadikan KRB III diperbolehkan ada pemukiman harus dilakukan oleh pemerintah, karena proses pemindahan secara mandiri tidak mungkin dilakukan. Pendekatan

*“living in harmony with disaster”*

menjadi jalan tengah dalam penataan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gunung Merapi.

### **3.3. Artikulasi Kearifan Lokal Dalam PRB Berbasis Komunitas**

#### **3.3.1. Wacana Global Penanggulangan Bencana dan Kearifan Lokal**

Perspektif global tentang kebencanaan dan kearifan lokal dilakukan oleh LSM dan Negara dalam bentuk *Community Based Disaster Risk Reduction* (CBDRM) atau Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Sebagai embrio program ini, Kappala (Komunitas Pencinta Alam dan Pemerhati Lingkungan) mengklaim dirinya yang menginisiasi program tersebut sejak pasca letusan Gunung Merapi tahun 1994, secara otodidak dan konseptualisasi merupakan kerja bersama komunitas di lereng Merapi. Kegiatan ini tidak lepas dari persinggungan dengan aktor-aktor PRB internasional seperti Oxfam yang berbasis di Yogyakarta (Lassa, dkk, 2009: 1).

Komunitas menjadi kata kunci peran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bagaimana komunitas

lereng Merapi tumbuh dan terekspose keluar daerah karena banyak LSM yang bekerja di lokasi. Penguatan komunitas ini terjadi sejak tahun 2006 ketika Gunung Merapi meningkat aktifitasnya. Para penggerak membangun komunitas untuk kesiapsiagaan bencana. Komunitas pertama yang dibentuk adalah Tumpeng Merapi, selanjutnya Pasag Merapi dan Jalin Merapi, Komunitas ini memunculkan tokoh-tokoh lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas.

Aspek menonjol dari transformasi wacana pengurangan risiko bencana adalah implikasi hadirnya makna kontestasi KRB III. Dalam konteks ini menegaskan bahwa daya tahan masyarakat lereng Gunung Merapi dalam menghadapi ancaman bencana berdasarkan kearifan lokal masyarakat Balerante. Pengakuan atas kearifan lokal dalam penanganan bencana ini dapat dilihat dari masuknya komunitas-komunitas itu di media *mainstream* dan juga dalam forum-forum Nasional maupun Internasional. Sukirman merupakan koordinator Jalin Merapi selalu dimintakan

pendapatnya, dalam penanganan bencana tingkat komunitas.

### 3.3.2. Manifestasi Kearifan Lokal

#### 1) Kepercayaan Lokal

Penduduk Desa Balerante mayoritas beragama Islam yang menurut penggolongan Clifford Geerts (1981) termasuk kelompok abangan. Budaya masyarakat lereng Merapi dipengaruhi oleh budaya Jawa-Mataraman terlihat dari tradisi masyarakat yang mempercayai adanya otoritas kerajaan Mataram dengan memberikan mandat pada juru Kunci di lereng Merapi. Sedangkan, Desa Balerante tidak memiliki ketergantungan otoritas kebudayaan. Artikulasi lain muncul dari adanya dialektika timbal balik dengan proses internal di masyarakat. Legitimasi bahwa wilayah sekitar Balerante merupakan halaman depan dari Kerajaan Gunung Merapi, maka tidak mungkin kraton akan membuang kotoran di halaman depan. Di samping itu Gunung Kendil dan Gunung Kukusan sering disebut Biyung Bibi adalah Gunung Purba yang lebih tua dari Gunung Merapi, sehingga tidak mungkin lahar akan melewatinya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Diro (56) sebagai berikut :

*“Ketika Merapi erupsi, tapi jalannya abu malah naik dibuang jauh dan di sini tidak kena. Di sini itu tamengnya Gunung Kendil dan Gunung Kukusan, kalau tidak ada dua gunung tersebut disini tidak berani menempati, gunung ini biasanya disebut Biyung Bibi. Dulu ketika mremplu (erupsi) keluar abu Gunung Kukusan keluar that-thit (lidah api seperti petir) itu kata orang tua dulu, Biyung Bibi menyabetkan kemben agar tidak sampai ke halaman depan, dulu kalau ada abu pasti ada itu, makanya disini tenang saja”.*

Bagi kalangan kelompok muda, mitos ini kemudian dirasionalisasikan dalam bentuk wacana tentang kontur Gunung Bibi yang mempunyai jurang cukup dalam, sehingga tidak mungkin ada erupsi besar sampai wilayah mereka. Hal itu juga dipengaruhi oleh arah angin yang membawa awan panas, bisa terbacakan oleh pemahaman masyarakat sekarang. Jadi orang yang tinggal di lereng Gunung Merapi merasa sangat memahami bagaimana sifat dan karakter Merapi.

Larangan, slametan, dan kepercayaan terhadap mitos-mitos

merupakan kepercayaan masyarakat Jawa perdesaan, kemudian di revitalisasi oleh masyarakat di selatan Gunung Merapi dengan mengadakan larungan dengan melibatkan banyak *stakeholder*. Warga Desa Balerante yang muda-mudapun diminta terlibat untuk meramaikan acara larungan sebagai momentum budaya bagi masyarakat lereng Merapi.

## 2) Kesiapsiagaan Bencana/Pemantauan Gunung Merapi

Tanda erupsi Merapi bisa diterima orang melalui mimpi yang itu tidak mungkin disampaikan ke orang lain. Tanda-tanda alam seperti suhu sekitar kampung mulai terasa panas, pohon-pohon mulai layu, dan juga hewan-hewan dari gunung yang turun ke pemukiman, tidak bisa menjadi acuan secara bersama-sama. Yang menjadi tanda acuan masyarakat adalah pos Pemantauan Gunung Merapi yang terletak di Gunung Plawangan.

Pemantauan Gunung Merapi sudah ada sejak jaman kolonial, bagi masyarakat Desa Balerante, Pemantauan Merapi di Plawangan menjadi acuan peringatan dini dalam menghadapi erupsi Gunung Merapi. Dengan hancurnya

Turgo tahun 1994, juga mempengaruhi warga Balerante dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi. Hal ini dikarenakan pos pemantauan Gunung Merapi di Plawangan sudah tidak ada lagi, akses yang dimiliki masyarakat terhadap peringatan dini Gunung Merapi dari BPPTKG, tidak dapat terdistribusikan dengan cepat kepada warga karena urusan sistem administratif pemerintahan.

Kebiasaan ketika erupsi Gunung Merapi mendengar tanda-tanda dari gunung Plawangan sudah tidak ada lagi, pertemuan antara pengetahuan tradisional dan wacana pengurangan risiko bencana erupsi Gunung Merapi dimulai sejak tahun 2006, dimana warga Desa Balerante diminta mengungsi oleh pemerintah. Relawan yang bekerja ketika Gunung Merapi waspada pada tahun 2006 hanya ada beberapa organisasi saja, masih sedikit kepedulian terhadap bencana. Ketika koordinasi dalam penanganan pengungsi hanya BMKG dan SAR DIY yang bekerja, salah satu warga Desa Balerante yang terlibat adalah Bapak Agus Sanyoto. Dari pertemuan itulah kemudian dia mulai mempelajari tanda-tanda erupsi dengan menggunakan seismograf.

Selama beberapa bulan mempelajari sifat Gunung Merapi secara autodidak kemudian dia mencari software yang bisa menghubungkan tanda-tanda seismograf ke dalam komputer. Kemudian dia membeli komputer rakitan untuk menggunakan software yang diberikan salah satu temannya yang bekerja di BPPTKG. Sejak itulah kemudian sinyal seismograf sebagai patokan dalam melihat tanda-tanda erupsi Merapi. Selain menggunakan peralatan berupa seismograf, dalam pemantauan Gunung Merapi juga menggunakan alat berupa thermometer untuk mengukur suhu udara, *hygrometer* untuk mengukur kelembaban udara, dan plastik yang digantungkan untuk melihat arah angin. Dengan berbekal, alat-alat tersebut maka informasi kemudian dibangun Pengalaman erupsi tahun 2006 menjadi pengalaman berharga bagi Relawan Induk Balerante, bagaimana ketika situasi Gunung Merapi mulai dinyatakan waspada kemudian suhu dan kelembaban udara di catat setiap hari.

Tahun 2010, otoritas pengamatan swadaya yang dilakukan relawan Induk Balerante

mendapatkan momentumnya. Seluruh warga Balerante selamat dari terjangan awan panas erupsi Gunung Merapi, kecuali satu orang yang memang tidak mau diminta untuk mengungsi. Apalagi ketika kejadian meninggalnya Mbah Maridjan sebelum pemerintah memberi peringatan untuk warga di sekitar Glagahharjo Cangkringan, dari Induk Balerante sudah menginformasikan dan meminta warga untuk bergeser. Manifestasi teknologi pemantauan Gunung Merapi yang dilakukan oleh warga Desa Balerante, tidak lepas dari pengalaman sehari-hari yang dimiliki hampir setiap warga yang kemudian dimodifikasi dengan adanya alat pemantauan tersebut, tanpa meninggalkan budaya tutur tentang kawasan Merapi yang diperoleh secara turun-temurun dari para orang tua. Teknologi menjadi alat konfirmasi bagi pengalaman dari warga yang terhadap kejadian dan tanda-tanda gaib yang masih dipercaya, sehingga dari pengalaman kemudian mereka mengkonfirmasi perkembangan dengan mengakses frekwensi 907 melalui HT yang mereka miliki ataupun datang langsung ke Posko Induk Balerante

untuk diskusi tentang perkembangan Gunung Merapi.

### 3) Perencanaan Evakuasi

Pengalaman Bapak Diro (56) pada pengungsian tahun 1950an, ketika belum tinggal di Sambungrejo Desa Balerante dan masih di Nglangon, Cangkringan sebagai berikut :

*“Kalau seperti sekarang pemerintah membuatkan tempat pengungsian, kalau dulu pemerintah menitipkan di rumah orang, dalam satu rumah ditempati tiga orang pengungsi. kemudian setiap sore dikontrol oleh pemerintah, bagaimana urusan makannya, pemerintah waktu itu masih susah hanya diberi beras dan ikan asin. Kalau membagi ikan asin itu pakai kampak, dibagi-bagi. Itu yang saya ingat”.*

Dengan sering komunikasi antar kampung pengungsi dari tempat pengungsian terjalin hubungan kekeluargaan, bahkan ada yang menikah diantara mereka, sehingga menambah kedekatan. Perubahan sikap dalam melihat situasi Gunung Merapi ini terjadi mulai tahun 2010, yang ternyata keyakinan atas “latar Merapi” yang tidak mungkin kotoran

akan dibuang di Desa Balerante ternyata pupus oleh situasi erupsi tahun tersebut. Hal ini juga disebabkan karena sudah tidak banyak warga yang “sobo” ke gunung-gunung sekitar Merapi, karena akses akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan penghidupan dengan bekerja di sungai ataupun ketika mencari pakan ternak lebih baik membeli ke pasar daripada harus naik ke gunung.

### 3.3.3. Integrasi PRBBK Dengan Karifan Lokal

#### 1) Radio Komunitas Di Sekitar Lereng Merapi

Induk Balerante 907 merupakan radio komunitas yang menjadi sumber informasi dan berita tentang kondisi Merapi bagi masyarakat, disamping informasi dari BPPTK. Radio komunitas tidak saja memberikan informasi tetapi juga menyalurkan bantuan logistik, pencarian orang hilang, hingga penyembuhan trauma, seperti yang dilakukan oleh Jalin Merapi. Induk Balerante menjadi posko bagi para relawan siaga bencana dalam peningkatan kapasitas dan koordinasi pelaksanaan tanggap darurat oleh BPBD Kabupaten Klaten.

## 2) Organisasi Pengurangan Risiko bencana

Pembentukan organisasi akar rumput seperti Jalin Merapi di Sidorejo, Kecamatan Kemalang untuk pengurangan risiko bencana Merapi sudah dibangun sebelum erupsi Merapi tahun 2010. Keputusan untuk hidup berdampingan dengan bencana oleh pemerintah mengubah *landscape* program relokasi dari JRF-REKOMPAK Kementerian PU. JRF-REKOMPAK Kementerian PU dalam menginisiasi terbentuknya OPRB di 13 desa/kelurahan dan menggelar simulasi penanggulangan bencana erupsi dan lahar dingin Merapi. Bersama masyarakat membuat protap/rencana kontigensi ketika kejadian bencana, dengan membangun gagasan tentang tiga jalur evakuasi sesuai dengan kedekatan masing-masing desa ke wilayah evakuasi yang telah ditata oleh BNPB dan pemerintah Kabupaten dengan shelter-shelternya.

## 3) *Sister Village*

Desa penyangga bagi para pengungsi Merapi merupakan program pemerintah yang cukup lama tetapi tidak diterapkan lagi karena tidak ada *shelter-shelter* bagi para pengungsi Merapi di tahun

1950an. Pemerintah menitipkan warganya ke desa-desa lain yang lebih aman, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Diro. Ketika itu desa-desa yang dititipi pemukiman untuk para pengungsi masih sangat luas. Setiap rumah bisa menampung 4-5 orang pengungsi. Saat ini model *sister village* tersebut digunakan kembali oleh para pegiat pengurangan risiko bencana dan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam membangun shelter dan kandang komunal untuk evakuasi ternak para pengungsi.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Simpulan

1) Kepentingan Pemerintah dalam pengelolaan Akses KRB III untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang lebih besar di masa depan dengan rencana merelokasi warga di ATL I/KRB III tidak serta merta diterima oleh warga yang merasa memiliki sistem nilai tersendiri dalam penanganan bencana.

2) Teritorialisasi yang belum sempurna dalam relokasi warga Desa Balerante, terjadi dengan program-program yang berbeda antar instansi, tidak saling menguatkan tetapi kadang bertentangan satu sama lainnya.



3) Kearifan lokal dalam kesiapsiagaan bencana diwujudkan warga desa Balerante dengan melakukan pemantauan mandiri terhadap Gunung Merapi dengan teknologi sederhana.

#### 4.2. Saran

1) Dalam penataan kawasan pasca bencana, Pemerintah seharusnya melihat sistem nilai di masyarakat dalam penanganan bencana, sehingga kegiatan dalam pembangunan masyarakat dapat terintegrasi dengan program yang dijalankan.

2) Dalam pelaksanaan relokasi warga pascabencana, koordinasi antara pelaku penanggulangan bencana sangat penting dilakukan agar program utama tidak bertentangan.

3) Pemantauan Mandiri terhadap Gunung Merapi diharapkan bisa terjadi disetiap komunitas dan tersimulasikan dengan baik antar pelaku serta terintegrasi dengan kegiatan pemantauan gunung api yang dilakukan oleh negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

BNPB & Bappenas, 2011, *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi Di Propinsi DI Yogyakarta dan Propinsi*

*Jawa Tengah, 2011- 2013, Jakarta : BNPB.*

D'andrea, Claudia. 2013. *Kopi, Adat dan Modal, Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah*, Bogor: Yayasan Tanah Merdeka, Tanah Air Beta & Sajogjo.

Geertz, Clifford, 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Bandung: Dunia Pustaka Jaya.

Kuswijayanti, Elisabet Repelita, 2007, *Konservasi Sumberdaya Alam di Taman Nasional Gunung Merapi: Analisis Ekologi Politik*, IPB, Bogor.

Li, Tania Murray, 2007, *Keterpingiran, Kekuasaan dan Produksi: Analisis Terhadap Transformasi Daerah Pedalaman. Dalam: Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Li, Tania Murray, ed, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 3-75.

Satria, Arif, 2009, *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.

#### Internet

Lassa, Jonathan, *Indosasters Working Paper # 5, Indosasters Working Paper # 5 Evaluation of Disaster Governance in Indonesia: 2004-2006*, [http://www.zef.de/module/register/media/3ec5\\_Disaster-Governance-WP5.pdf](http://www.zef.de/module/register/media/3ec5_Disaster-Governance-WP5.pdf).

- diakses tanggal 2 Maret 2014.
- Tarmuji, Ahmad. 2012, Ekologi politik: Body of knowledge, sejarah pemikiran, dan perkembangan empirik terkini. *Jurnal Komunitas*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2012, pp 173-187, <http://www.labsosiologiunj.org/wp-content/uploads/2013/07/AHMAD-TARMIJI-AEKOLOGI-POLITIK.pdf>, diakses tanggal 5 Maret 2014.
- Woro Caritas, R. Murdiati. 2013. *Rekonstruksi Kearifan Lokal Sebagai Fundasi Pembangunan Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan: Studi Terhadap Masyarakat Adat Kajang*, prosiding, The 5<sup>th</sup> International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization" <https://icssis.files.wordpress.com/2013/09/2013-01-09.pdf>, diakses tanggal 1 Maret 2015.
- Shohibudin, M, 2003, *Artikulasi Kearifan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Sebagai Proses Reproduksi Budaya (Studi Komunitas Toro di Pinggiran Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah)*, Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Suryo Adi Pramono, *Pro – Kontra Kebijakan Relokasi Korban Erupsi Merapi Studi Kasus: Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman DIY dan Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah – Program Studi Sosiologi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya